

Analisis Potensi Pulau Gili Barat Kecamatan Sangkapura Menjadi Destinasi *Halal Tourism*

Moh. Faizin¹⁾, Sherawali²⁾, Izzatul Afiani³⁾, M. Ferdiawan Afandi⁴⁾

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

^{3,4} STIT Raden Santri Gresik

*Email korepondensi: sherawali05@gmail.com

Abstract

Pulau Bawean merupakan salah satu pulau kecil yang terletak di tengah laut antara pulau Jawa dan Kalimantan. Pulau yang berjarak 120 kilometer sebelah utara Gresik ini hanya terdiri dari 2 kecamatan yaitu Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak. Pulau ini terdapat banyak destinasi wisata yang berpotensi dikembangkan dengan konsep pariwisata halal (*halal tourism*) mengingat mayoritas penduduknya beragama islam terutama pada Pulau Gili Barat. Konsep wisata halal ini menjadi fokus baru dalam pengembangan pariwisata oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia. Dengan adanya konsep wisata halal ini diharapkan mampu menambah jumlah kunjungan wisatawan baik lokal maupun non lokal. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Data yang digunakan berasal dari wawancara, observasi dan dokumentasi dengan beberapa informan yang terlibat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pulau Gili Barat yang terletak di Kecamatan Sangkapura untuk saat ini belum bisa dikatakan termasuk dalam kriteria wisata halal. Hal ini berdasarkan kriteria 4A (Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas dan Ancillary) belum sepenuhnya tersedia di Pulau Gili Barat. Namun pulau ini memiliki potensi untuk terpenuhinya kriteria-kriteria tersebut dengan adanya bantuan dari para stakeholder yang berwenang. Beberapa para pelaku pariwisata baik penyedia hotel, pengelola tempat wisata dan wisatawan mendukung apabila Pulau Gili Barat menjadi destinasi wisata halal.

Keywords : Wisata Halal, Pulau Bawean, Gili Barat

Saran sitasi: Faizin, M., Sherawali., Afiani, I., & Afandi, M. F. (2022). Analisis Potensi Pulau Gili Barat Kecamatan Sangkapura Menjadi Destinasi *Halal Tourism*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3527-3532. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6464>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6464>

1. PENDAHULUAN

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor dengan potensi yang tinggi dalam perekonomian suatu negara. Indonesia berpeluang besar untuk mengembangkannya. Hal ini mengingat adanya kekayaan alam dan budaya yang tersebar di setiap wilayah di Indonesia. Saat ini pariwisata telah menjadi suatu kebutuhan masyarakat yang dilakukan guna mencari hiburan dan menikmati keindahan alam. Semakin berjalannya waktu kebutuhan dalam perjalanan wisata bukan hanya di konsumsi oleh kalangan atas saja melainkan juga kalangan bawah. Sehingga sektor pariwisata sangat memiliki potensi esensial serta menjanjikan apabila dikembangkan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, pemerintah daerah dan negara (Ashoer, 2021).

Dengan populasi masyarakat muslim terbanyak di dunia, Indonesia mulai mengembangkan *trend* konsep pariwisata halal. Pariwisata halal merupakan salah satu sektor yang dikembangkan oleh ekonomi islam dengan mengusung konsep halal dalam pelaksanaannya. Konsep pariwisata halal dianggap menjadi cara pandang baru dalam mengembangkan pariwisata di Indonesia dengan tetap menjalankan nilai-nilai islam (Abrori, 2020). Indonesia berada pada posisi peringkat kedua setelah Malaysia atas capaiannya dalam bersaing mengembangkan destinasi wisata halal. Penghargaan ini diraih dalam Global Travel Muslim Index (GMTI) tahun 2022 (Dadan Kuswaraharja, 2022).

Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, wisata halal bukan merupakan

konsep mengislamisasikan wisata, melainkan menyediakan tambahan layanan seperti fasilitas dan aksesibilitas wisatawan muslim terkait tersedianya akomodasi, transportasi, paket wisata, keuangan dan makanan yang mengedepankan konsep halal. Dengan demikian, konsep pariwisata halal dikatakan sebagai jenis kegiatan menciptakan layanan baru dengan tidak

menghapus keseluruhan unsur yang ada pada wisata konvensional. Unsur-unsur wisata konvensional tetap digunakan apabila tidak bertentangan dengan nilai keislaman. Menurut (Jaelani, 2017) perbandingan antara pariwisata halal dan pariwisata konvensional adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Perbandingan Pariwisata Konvensional dan Pariwisata Halal

Item Perbandingan	Pariwisata Konvensional	Pariwisata Halal
Objek	Alam, budaya, warisan, makanan	Semua
Tujuan	Menghibur	Meningkatkan nilai religius melalui hiburan
Target	Kepuasan emosional dan kesenangan, semata-mata hanya untuk hiburan	Kepuasan emosional dan kesenangan serta menumbuhkan kesadaran beragama
Guide	Menjadi bagian yang menyatu dengan tujuan pariwisata, ritual ibadah menjadi tambahan saja	Membangkitkan minat wisatawan dalam berwisata di objek wisata dan sekaligus membangkitkan semangat religious wisatawan. Mampu menjelaskan fungsi dan peran Syariah dalam bentuk kebahagiaan dan kepuasan batin dalam kehidupan manusia
Fasilitas Ibadah	Sekedar pelengkap	Menjadi bagian yang menyatu dengan obyek pariwisata, ritual ibadah menjadi bagian paket hiburan
Kuliner	Universal	Spesifik halal
Relasi dengan Masyarakat dilingkungan Obyek Wisata	Komplementer dan hanya untuk keuntungan materi	Komplementer dan hanya untuk keuntungan materi
Agenda Perjalanan	Setiap Saat	Memperhatikan Waktu

Adapun kriteria utama wisata halal yaitu melihat lingkungan, akses, dan layanan dengan indikator tersedianya makanan halal, tempat sholat yang memadai, tersedia air bersih di toilet, tidak ada isu islamophobia, ada layanan saat ramadhan, pengalaman tentang islam di area wisata, terpisahnya laki-laki dan perempuan pada fasilitas umum seperti kolam renang, tempat olah raga, serta tidak terdapat aktivitas non-halal (Faraby, 2021). Sedangkan Menurut (Azhari Akmal Tarigan, 2017) kunci dari wisata halal yang sebenarnya ialah pada bentuk pelayanannya, bagaimana wisata tersebut memberikan layanan yang maksimal dan utama bagi wisatawan muslim mulai dari hotel syariah, makanan halal, dan kemudahan beribadah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pariwisata halal disini bukanlah sekedar wisata religi seperti umroh, haji, dan ziarah makam melainkan seluruh bentuk wisata dengan melayani gaya liburan sesuai kebutuhan wisatawan muslim.

Dengan sifatnya yang *universal* dalam menawarkan produk dan layanan jasa, pariwisata halal mulai diminati oleh masyarakat secara global.

Sehingga Kementerian Pariwisata telah menunjuk beberapa provinsi sebagai destinasi wisata halal yaitu: Aceh, Sumatra Barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan (Kurniawan, 2019). Beberapa provinsi diatas telah dilakukan penelitian terkait analisis potensi pengembangan destinasi wisata halal. Penelitian yang dilakukan (Bustamam, 2021) menunjukkan bahwa potensi wisata halal Propinsi Riau sangat layak dikembangkan karena didukung oleh *attraction*, *accessibility*, *amenities*, *ancillary services* dan *institutions* yang cukup baik. Penelitian juga dilakukan oleh (Noviarita, 2021) yang menunjukan bahwa destinasi wisata di Provinsi Lampung memiliki potensi untuk menjadi wisata syariah, hal tersebut didukung dengan penilaian empat aspek yang ada di objek wisata yang meliputi *attraction*, *accessibility*, *amenities*, dan *ancillary*. Penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho, 2019) juga memberikan hasil penelitian bahwa Nusa Tenggara Barat memiliki fasilitas dan layanan halal seperti hotel, restoran, tempat ibadah serta website yang menyediakan

kebutuhan-kebutuhan wisatawan muslim dunia. Dapat diketahui bahwa beberapa provinsi di Indonesia memiliki potensi atas pengembangan konsep wisata halal.

Pulau Bawean adalah pulau yang terletak di Laut Jawa, sekitar 120 kilometer sebelah utara Gresik. Secara administratif, pulau ini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Gresik. Pulau ini hanya terdiri atas dua kecamatan, yaitu Sangkapura dan Tambak. Pulau Bawean memiliki beberapa daerah yang berpotensi untuk dikembangkan destinasi wisatanya seperti di Kecamatan Sangkapura. Selain menjadi sentral wilayah, Kecamatan Sangkapura memiliki sejumlah destinasi wisata yaitu Danau Kastoba, Air Terjun Laccar, Pantai Ria, Pulau Gili Timur, Pulau Gili Barat, Pantai Selayar, Tanjung Gaa'ang, Penangkaran Rusa, dan Wisata Religi Makam Panjang. Akan tetapi, hingga saat ini destinasi wisata-wisata tersebut masih musiman. Mengingat sebagian besar penduduk bawean merupakan masyarakat beragama islam, maka pengembangan konsep pariwisata halal diharapkan dapat menarik pelaku wisata untuk berkunjung lebih banyak lagi. Belum adanya penelitian terkait analisis potensi Pulau Gili Barat menjadi wisata halal membuat penulis berkeinginan meneliti dengan tujuan untuk mengetahui apakah Pulau Gili Barat yang berlokasi di Kecamatan Sangkapura berpotensi menjadi salah satu destinasi wisata halal yang ada di Jawa Timur.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan secara mendalam terhadap objek penelitian yang kemudian hasil penelitian akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk narasi atas kajian suatu fenomena yang diteliti (Fitria Widiyani Roosinda, 2021). Lokasi penelitian dilakukan di Pulau Gili Barat Kecamatan Sangkapura pada 10 Agustus 2022- 17 Agustus 2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data primer ini dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan beberapa narasumber. Narasumber dalam penelitian ini yaitu kepala Dusun Gili Barat dan tim pengelola wisata Gili Barat terkait potensi pengembangan Pulau Gili Barat menjadi wisata halal. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku, jurnal, laporan, berita, dan sumber dari internet sebagai pendukung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Menurut Kementerian Pariwisata Tahun 2015, kesiapan destinasi wisata halal dapat dilihat melalui komponen variabel sebagai berikut:

a. Atraksi

Dalam pariwisata, atraksi diartikan sebagai suatu objek wisata yang memberikan kenikmatan kepada para pengunjungnya. Atraksi menjadi alasan bagi para wisatawan untuk memilih suatu wisata. Wisatawan akan mempertimbangkan hal-hal yang bisa dilihat (*what to see*) dan aktivitas yang dapat dilakukan (*what to do*) ketika memilih sebuah objek wisata yang akan didatangi. Terdapat beberapa jenis dari suatu atraksi yaitu atraksi alam, atraksi budaya dan atraksi buatan.

Suatu atraksi dapat dikatakan mendukung pengembangan wisata halal apabila memenuhi beberapa syarat seperti adanya pertunjukan yang tidak bertentangan dengan standar pariwisata halal pada umumnya. Selain itu, suatu objek wisata harus terjaga kebersihannya. Kebersihan akan mencerminkan keimanan dan kenyamanan bagi wisatawan muslim. Suatu wisata juga harus memiliki tempat ibadah dan fasilitas bersuci yang layak. Hal ini guna memberikan kemudahan pada wisatawan muslim untuk tetap dapat menjalankan ibadah di tempat wisata. Tersedianya makanan dan minuman halal pada lokasi wisata juga sangat diperlukan dalam pengembangan konsep wisata halal.

b. Amenitas

Dalam pengembangan suatu wisata diperlukan adanya amenities. Amenitas mencakup segala macam sarana dan prasarana yang diperlukan oleh wisatawan selama berada di daerah wisata berupa akomodasi, rumah makan, agen perjalanan dan fasilitas pendukung lainnya. Hal ini memiliki tujuan untuk menciptakan kenyamanan, kemudahan, dan keselamatan wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata. Dalam konsep pariwisata halal dibutuhkan fasilitas yang layak untuk bersuci dan beribadah, rumah makan yang menyediakan makanan dan minuman halal, akomodasi perhotelan syariah, agen perjalanan yang sesuai dengan standart wisata halal, dan pemandu wisata yang menerapkan nilai-nilai syariah ketika menjalankan tugasnya.

c. Aksesibilitas

Faktor utama dalam kegiatan pariwisata adalah aksesibilitas. Akses ke segala bentuk layanan transportasi sangat penting bagi industri pariwisata. Tidak akan ada pertumbuhan wisatawan apabila akses menuju wisata tersebut tidak mudah di akses.

Accessibilitas ini juga memiliki dua variable yaitu informasi dan keterjangkauan biaya. Yang pertama dan paling mendasar adalah akses informasi, dimana wisatawan dapat mengetahui terkait SOP wisata halal. Yang kedua adalah keterjangkauan dimana indikatornya adalah meliputi tempat wisata yang dapat diakses dengan biaya transportasi yang wajar. Jika kedua variable aksesibilitas terpenuhi, wisatawan akan merasa nyaman di lokasi wisata halal tersebut.

d. Ancillary

Dibutuhkan peran dari pemerintah setempat di wilayah tujuan wisata untuk menyediakan layanan tambahan terkait keberlanjutan pariwisata. Sebagai strategi dalam mewujudkan wisata halal tersebut yaitu kelembagaan. Kelembagaan ini dapat mengambil peran untuk membentuk kerangka kerja legislative, kebijakan, atau ide sebagai rasa keterlibatan dalam pengelolaan wisata halal. Hal ini berfungsi sebagai sistem pendukung keberlanjutan wisata halal. Indikator kedua dalam kelembagaan ini adalah pemberdayaan masyarakat, dimana hal ini mengindikasikan bahwa tempat wisata suatu wilayah tersebut dapat memanfaatkan tenaga kerja dari penduduk setempat. Oleh karena itu, sikap masyarakat perlu dibina agar lebih terbuka menerima wisatawan agar wisatawan yang sedang berada di daerahnya merasa aman dan nyaman. Terakhir adalah pemasaran. Pemasaran ini tidak kalah pentingnya. Suatu wisata harus ada sistem pemasaran yang maksimal. Strategi promosi harus tepat sasaran dan efektif agar wisatawan yang berkunjung bisa maksimal dalam menikmati wisata.

3.2. Pembahasan

Gili Barat merupakan pulau kecil terpisah di lokasi Desa Dekatagung yang kemudian dihubungkan dengan jembatan batu karang. Eksistensi Gili Barat terkenal dengan adanya tumbuhan pohon kelapa bercabang sembilan yang konon katanya berkhasiat menyembuhkan beberapa macam penyakit dan

penawar racun. Gili Barat juga terkenal dengan wisata pantai dan *mangrove*. Wisata *mangrove* ini sempat mendatangkan wisatawan yang cukup banyak dan menjadi daya tarik masyarakat setempat dalam berwirausaha.

Menurut Kepala Dusun Gili Barat ketika dilakukan wawancara menjelaskan bahwa akan merasa senang sekali apabila konsep *halal tourism* bisa diterapkan di wisata Gili Barat dengan potensi wisata yang tersedia, namun semuanya bergantung pada bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah Desa untuk pengelolaan dan pengembangan wisata Gili Barat . Menurutnya destinasi wisata yang berpotensi di Gili Barat ialah wisata pantai dan *mangrove*.

Menurut informan dari Tim Pengelola Wisata Gili Barat sendiri apabila akan diterapkan konsep *halal tourism* pada pulau Gili Barat , mungkin masih belum sepenuhnya siap. Jika dilihat dalam aspek atraksi , wisata yang tersedia adalah wisata alam berupa pantai dan *mangrove* dengan kebersihan lingkungan yang masih kurang sebab masih banyak sampah dibuang di tepi *mangrove*. Namun terkait penyediaan layanan memudahkan beribadah , pulau Gili Barat telah tersedia mushollah yang sangat layak digunakan untuk para pelaku pariwisata dengan kebersihan dan ketersediaan air bersih yang layak.

Ditinjau dari aspek amenities terkait fasilitas - fasilitas yang harus ada pada suatu wisata halal , di pulau Gili Barat sendiri belum memiliki fasilitas MCK atau toilet yang dikhususkan untuk para wisatawan yang berkunjung dengan dibedakan antara wisatawan laki-laki dan perempuan. Pada aspek amenities terkait fasilitas restoran penyedia makanan dan minuman halal dan perhotelan di sekitar Pulau Gili Bara hanya terletak di Sangkapura. Namun belum semuanya restoran atau penyedia makanan dan minuman yang tersedia terjamin kehalalan produk yang ditawarkan sehingga perlu adanya sosialisasi dan pendampingan untuk mendapatkan sertifikasi halal pada restoran yang ada guna menjamin kehalalannya. Dalam aspek amenities terkait penyedia perhotelan berbasis syariah telah tersedia. Beberapa pemilik hotel menerapkan aturan untuk menunjukkan surat nikah apabila ada pengunjung berpasangan yang hendak menggunakan akomodasi tersebut. Pemilik hotel melakukan hal tersebut agar bisnis yang dimiliki menghindari perbuatan buruk. Ketersediaan amenities dalam hal agen perjalanan wisata dan pramuwisata , di Pulau Gili Barat masih belum tersedia sebab pengunjung

dibiarkan menikmati wisata alam dengan sendirinya tanpa ada *tour guide* yang mengarahkan. Adapun jika sangat dibutuhkan *tour guide* untuk menemani para wisatawan, belum semuanya sumber daya manusia yang dijadikan sesuai dengan indikator terkait pramuwisata.

Pada aspek aksesibilitas dalam hal kemudahan transportasi sendiri, Pulau Bawean telah memiliki pelabuhan dan bandara udara. Namun aksesibilitas transportasi menuju ke wisata Gili Barat hanya dapat dilalui dengan menggunakan sepeda motor mengingat jembatan yang menuju ke Pulau Gili Barat tidak luas. Sehingga para wisatawan diperlukan lebih waspada ketika menuju ke Pulau Gili Barat.

Kemudian dalam aspek *ancillary* terkait kelembagaan, di wisata Pulau Gili Barat sendiri sudah tersedia tim pengelola wisata yang anggotanya berasal dari pemuda setempat sendiri hal dikarenakan pasifnya Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang ada di Desa Dekatagung. Namun keberadaan tim pengelola wisata ini masih minim pengetahuan terkait pemasaran produk wisata dan minimnya pengetahuan terkait konsep *halal tourism* itu sendiri.

Melihat potensi keindahan alam yang ditawarkan oleh Pulau Gili Barat dengan suguhan pantai dan mangrovenya, dibutuhkan bantuan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk merealisasikan harapan dari masyarakat Gili Barat terkait pengembangan aset wisatanya. Gili Barat memang sangat berpotensi dijadikan destinasi wisata namun untuk saat ini konsep pengembangan *halal tourism* belum sepenuhnya bisa dikatakan wisata halal sebab fasilitas-fasilitas tambahan yang dikriteriakan tidak sepenuhnya tersedia. Hal tersebut membutuhkan dukungan dari para *stakeholder* untuk penambahan fasilitas-fasilitas yang belum tersedia guna menerapkan konsep *halal tourism* di Gili Barat. Harapan dari tim pengelola wisata sendiri yaitu memajukan Gili Barat agar dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan mancanegara dan mendapatkan pengunjung wisata yang ramai. Hal ini tidak terlepas dari keinginan dalam memajukan perekonomian masyarakat Pulau Gili Barat.

4. KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Gili Barat yang berlokasi Di Kecamatan Sangkapura Bawean berpotensi untuk diterapkan konsep pariwisata halal. Namun untuk saat ini belum siap sepenuhnya untuk dapat dikatakan salah satu

destinasi wisata halal di Jawa Timur. Hal ini dikarenakan berdasarkan pada indikator penunjang wisata halal yang terdiri dari atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan *ancillary* belum sepenuhnya ada di Pulau Gili Barat. Namun dari kepala dusun dan masyarakat setempat beserta dengan tim pengelola wisata Pulau Gili Barat secara terbuka siap menerima bantuan dan kerjasama untuk pemenuhan fasilitas-fasilitas pendukung diterapkannya konsep *halal tourism*. Para pelaku pariwisata baik hotel, pengelola tempat wisata dan wisatawan mendukung apabila Pulau Gili Barat menjadi destinasi wisata halal. Hal ini dilakukan tidak terlepas dari harapan untuk kemajuan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

5. REFERENSI

- Abrori, F. (2020). *Pariwisata halal dan peningkatan kesejahteraan*. Literasi Nusantara.
- Ashoer, dkk. (2021). *Ekonomi Pariwisata*. Yayasan Kita Menulis.
- Azhari Akmal Tarigan. (2017). Dari Etika ke Spiritualitas Bisnis. *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 110, 9).
- Bustamam, N., Suryani, S. (2021). Potensi Pengembangan Pariwisata Halal dan dampaknya Terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 32(2), 146–162.
- Dadan Kuswaraharja. (2022). *Wisata Halal Indonesia Peringkat 2, Hanya Kalah dari Malaysia*. Detik Travel. <https://travel.detik.com/travel-news/d-6105867/wisata-halal-indonesia-peringkat-2-hanya-kalah-dari-malaysia>
- Faraby, M. E. (2021). Potensi Kabupaten Bangkalan Menjadi Destinasi Wisata Halal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 67.
- Fitria Widiyani Roosinda. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Zahir Publishing.
- Jaelani, A. (2017). Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek (Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects). *MPRA Paper*, 76237, 1–20.
- Kurniawan, F., dkk. (2019). Pemetaan Potensi Wisata Halal Di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Indonesia. *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 5(2).
- Noviarita, H., Kurniawan, M., & Nurmalia, G. (2021). Analisis Halal Tourism dalam Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 302.
- Nugroho, M. S., & Suteja, I. W. (2019). Eksplorasi Potensi Pulau Lombok Sebagai Destinasi Wisata Halal Di Nusa Tenggara Barat. *Media Bina Ilmiah*, 13(7), 1337–1342.

Lampiran



Tim Peneliti bersama Kepala Dusun Gili Barat



Tim Peneliti bersama Kelompok Sadar Wisata Desa Dekatagung



Tim Peneliti bersama Tim Pengelola Wisata Dusun Gili Barat